



Pengaruh Implementasi Program Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba terhadap Partisipasi Lembaga Pendidikan Menengah dan Tinggi dalam Mewujudkan Efektivitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Anas Saepudin

Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Garut

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh implementasi program advokasi pencegahan penyalahgunaan narkoba terhadap partisipasi lembaga pendidikan menengah dan tinggi dalam mewujudkan efektivitas pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Garut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan teknik survey. Populasi penelitian adalah Perguruan Tinggi, Sekolah SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat yang telah mendapatkan program advokasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dari BNNK Garut sejumlah 59 lembaga. Hasil pengujian hipotesis utama menunjukkan bahwa implementasi program advokasi pencegahan penyalahgunaan narkoba berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap partisipasi lembaga pendidikan menengah dan tinggi dalam mewujudkan efektivitas pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Garut. Demikian pula hasil pengujian sub hipotesis menunjukkan seluruh variabel memberikan pengaruh positif dan signifikan. Artikel ini berkesimpulan, bahwa untuk mewujudkan efektivitas pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Garut, dapat diupayakan melalui peningkatan partisipasi lembaga pendidikan yang ditunjang oleh implementasi program advokasi pencegahan penyalahgunaan narkoba yang optimal oleh BNNK.

Kata kunci: *advokasi, efektivitas, implementasi, partisipasi, pencegahan narkoba*

1 Pendahuluan

Perkembangan kejahatan atau penyalahgunaan Narkoba dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Sekitar 1,5% dari seluruh populasi penduduk Indonesia merupakan penyalahguna (pemakai) Narkoba. Ini berarti terdapat sekitar 3,2 juta sampai dengan 3,6 juta penduduk Indonesia yang berkontak dengan penyalahgunaan zat-zat terlarang tersebut. Dari kisaran angka tersebut maka terdapat sekitar 15 ribu orang yang harus merengang nyawa setiap tahunnya karena penyalahgunaan Narkoba. Ironisnya dari jumlah tersebut tidak kurang dari 78% korban yang meninggal merupakan anak muda yang masih berusia antara 19-21 tahun (Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan BNN, 2010: 32). Data tersebut menunjukkan bahwa salah satu sasaran utama dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja, terutama di kalangan pelajar dan mahasiswa.

Peneliti menduga bahwa fakta-fakta pada fenomena masalah tersebut memiliki hubungan sebab akibat yang harus di teliti lebih jauh. Sehubungan dengan itu peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan judul: "Pengaruh Implementasi Program Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan

Narkoba Terhadap Partisipasi Lembaga Pendidikan Menengah dan Tinggi Dalam Mewujudkan Efektivitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba”.

2 Metodologi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Teknik penelitian ini menggunakan teknik survey. Kemudian untuk melihat kondisi objektif pada objek penelitian, peneliti menetapkan operasionalisasi variabel penelitian sebagai berikut:

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator
Implementasi Program Advokasi Penyalahgunaan Narkoba (Winarno, 2012)	Komunikasi	Sosialisasi kebijakan
		Kejelasan kebijakan
		Konsistensi kebijakan
	Sumber Daya	Kualifikasi SDM
		Dukungan Anggaran
		Dukungan fasilitas kebijakan
	Struktur Birokrasi	<i>Standar Operational Procedure</i> (SOP)
		Fragmentasi
	Disposisi	Pemahaman kebijakan
		Komitmen pelaksana
Partisipasi Lembaga Pendidikan Menengah dan Tinggi dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba (Iskandar, 2016)	Proses partisipasi	Tingkat keaktifan partisipan
		Dukungan pimpinan lembaga
	Bentuk Partisipasi	Pikiran
		Tenaga
	Pelaksanaan partisipasi	Frekuensi dan intensitas partisipasi
		Kontinuitas
Efektivitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba (Iskandar, 2016)	Kebijakan dasar, tujuan dan rencana diketahui secara terbuka oleh seluruh pihak	Kebijakan pencegahan narkoba diketahui secara terbuka oleh seluruh stakeholder
		Tujuan dan rencana program pencegahan penyalahgunaan narkoba diketahui secara terbuka
	Kejelasan strategi kegiatan untuk mencapai tujuan	Strategi Penciptaan Lingkungan Bersih Narkoba
		Terlaksananya kegiatan umpan balik yang dilaksanakan oleh sekolah/ Perguruan Tinggi
	Hasil yang akan dicapai	Imunitas Terhadap Penyalahgunaan Narkoba
		Penurunan Penyalahgunaan Narkoba

Berdasarkan substansi pokok penelitian yang dilakukan, sasaran populasi (population target) dari penelitian ini adalah Perguruan Tinggi, Sekolah SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat yang telah mendapatkan program advokasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dari BNNK Garut. Jumlahnya sebanyak 59 lembaga pendidikan terdiri dari 14 SMP/ sederajat, 35 SMA/ sederajat dan 10 PT. Adapun unit analisis dari populasi penelitian adalah Wakil Kepala Sekolah bidang

kesiswaan pada SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat serta Wakil Rektor/ Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sensus, yaitu meneliti subjek penelitian secara menyeluruh. Peneliti tidak melakukan penarikan sampel, karena seluruh populasi lembaga pendidikan yang sudah mendapatkan program advokasi dijadikan responden. Untuk mengkaji secara objektif, hasil penelitian diverifikasi dengan berbagai sumber pustaka, sebagaimana yang direkomendasikan oleh Ramdhani, & Ramdhani (2014), dan Ramdhani, Ramdhani, & Amin (2014).

3 Hasil dan Pembahasan

Garut sebagai salah satu daerah wisata turis asing maupun domestik juga memiliki potensi sangat tinggi dan sangat rawan dengan peredaran, penyalahgunaan hingga pecandu narkoba. Menurut hasil penelitian BNN tahun 2015, prevalensi penyalah guna narkoba di Jawa Barat sebesar 2,45% dari penduduk berusia 10-59 tahun. Jika penduduk Kabupaten Garut dalam rentang usia tersebut diperkirakan ada 1.828.260 orang, maka jumlah penyalah guna narkoba di Kabupaten Garut diperkirakan ada sebanyak 44.792 orang.

Adapun keterlibatan pelajar dan mahasiswa dalam penyalahgunaan narkoba menurut data BNN ada sebanyak 27% dari keseluruhan penyalahguna narkoba di Kabupaten Garut. Dari data tersebut diperoleh angka perkiraan bahwa di Kabupaten Garut ada 12.094 orang pelajar dan mahasiswa sebagai penyalahguna narkoba. Hal ini menggambarkan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba belum efektif dan masih harus dioptimalkan.

Agar upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan tersebut dapat mencapai sasaran yang diharapkan, maka perlu upaya secara preventif penanggulangan Narkoba yang dilakukan antara lain melalui partisipasi instansi atau lembaga pendidikan secara terpadu dan berkesinambungan. Oleh karena itu, Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Garut telah berupaya melaksanakan program advokasi pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada lembaga pendidikan yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi lembaga pendidikan tersebut. Program advokasi dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan seminar serta menyelenggarakan pelatihan kader Penyuluh Anti Narkoba bagi pelajar dan mahasiswa.

Penelitian ini merupakan penelitian pelaksanaan kebijakan advokasi. Pelaksanaan kebijakan adalah implementasi atau penerapan suatu kebijakan publik melalui program, aktifitas, aksi, atau tindakan dalam suatu mekanisme yang terikat pada suatu sistem tertentu (Ramdhani, & Ramdhani, 2017), sedangkan advokasi merupakan sebuah upaya persuasi yang mencakup kegiatan-kegiatan penyadaran, rasionalisasi, argumentasi dan rekomendasi/ saran untuk menindak-lanjuti sebuah kegiatan. Dengan dilakukannya advokasi berarti juga melakukan perubahan sosial yang mendasar dan diupayakan dapat berkesinambungan. Di sisi lain, advokasi juga memiliki fungsi untuk mempromosikan suatu perubahan dalam kebijakan, program atau peraturan serta untuk mendapatkan dukungan dari pihak-pihak lain, misalnya untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif (Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional, 2010).

Berdasarkan pengamatan awal peneliti, permasalahan belum efektifnya program pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa ini disebabkan oleh banyak faktor, antara lain diduga disebabkan oleh partisipasi lembaga pendidikan yang masih rendah, dengan gejala sebagai berikut:

- a. Dari 59 lembaga pendidikan yang telah mendapatkan program advokasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba sepanjang 2013-2016, baru 13 lembaga pendidikan yang melakukan tindak lanjut program advokasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba
- b. Pemetaan spasial yang belum komperhensif atas masalah penyalahgunaan narkoba. Untuk menangani masalah ini secara efektif dapat dirancang Sistem Informasi Geografis (SIG) daerah potensi penyalahgunaan narkoba. SIG adalah pengorganisasian dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografis, metode, dan personalia yang dirancang secara efisien untuk memperoleh, menyimpan, memperbaharui, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi dalam format geografis (Bustomi, Ramdhani, & Cahyana, 2012). Penggunaan teknologi informasi akan memudahkan pekerjaan pemerintah dalam melaksanakan pekerjaannya (Tsabit, Ramdhani, & Cahyana, 2012; Slamet, Rahman, Ramdhani, & Darmalaksana, 2016)
- c. Masih sedikitnya sekolah yang melakukan evaluasi kegiatan yang berhubungan dengan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba;
- d. Kurang maksimalnya sekolah mengirimkan peserta untuk memenuhi undangan BNN;
- e. Belum teranggarkannya kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan penyalahgunaan narkoba dalam RAPBS.

Menurut Soelaiman (dalam Iskandar, 2016) partisipasi sosial dapat didefinisikan sebagai keterlibatan aktif warga masyarakat, baik secara perorangan, kelompok ataupun dalam kesatuan masyarakat, baik dalam bentuk proses pembuatan keputusan bersama, pelaksanaan program pelayanan sosial dan pembangunan masyarakat atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosialnya. Partisipasi sosial merupakan hal penting dalam pencegahan penggunaan narkoba, sebab akan menciptakan lingkungan yang membentuk karakter penghindar dari penyalahgunaan narkoba. Hal ini selaras dengan pendapat Ramdhani (2014) yang menyatakan bahwa lingkungan merupakan faktor pembentuk karakter seseorang.

Partisipasi yang masih rendah ini disebabkan berbagai faktor, salah satunya diduga disebabkan implementasi program advokasi yang belum optimal. Hal ini terlihat dari gejala sebagai berikut:

- a. Belum semua sekolah setingkat SMP, SMA dan Perguruan Tinggi di Kabupaten Garut mendapatkan program advokasi pencegahan penyalahgunaan narkoba;
- b. Belum rutusnya diseminasi informasi bahaya penyalahgunaan narkoba kepada siswa/mahasiswa;
- c. Belum dimuatnya materi bahaya penyalahgunaan narkoba ke dalam kurikulum atau mata pelajaran yang relevan;
- d. Masih kurangnya dukungan sekolah terhadap keberadaan kelompok pegiat anti narkoba;
- e. Masih kurangnya sumber daya manusia di BNNK Garut sehingga menghambat terselenggaranya program-program BNNK Garut;
- f. Tidak semua personil BNNK memiliki latar belakang pendidikan dan kompetensi yang relevan dengan tugas di BNNK.

Menurut Edward III (dalam Winarno, 2012) bahwa proses implementasi kebijakan tidak lepas dari berbagai variabel dan faktor yang mempengaruhinya. Menurutnya ada empat variabel penting yang harus diperhatikan dan berpengaruh terhadap kegagalan dan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Diantaranya adalah komunikasi (*communication*), model komunikasi yang dikembangkan ditujukan untuk membentuk konsensus antar pihak yang berkepentingan dengan program advokasi penyalahgunaan narkoba. Pembentukan konsensus dibentuk dengan komunikasi yang intens dengan menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution* (Ramdhani, & Suryadi, 2005), sehingga pelaksanaan program merupakan kesepakatan antar sektor, yang selanjutnya dapat dijalankan secara sinergis.

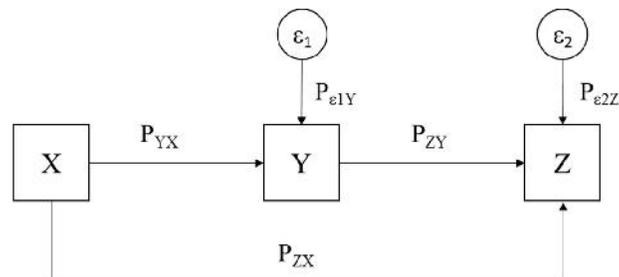
3.1 Deskripsi Variabel Penelitian

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, diperoleh deskripsi bahwa implementasi program advokasi telah dilaksanakan oleh BNNK, hanya saja masih terdapat sejumlah aspek yang harus dioptimalkan seperti jangkauan sosialisasi, frekuensi sosialisasi, dan lain sebagainya. Adapun partisipasi lembaga pendidikan dinilai baik, diindikasikan dengan adanya kesadaran dari lembaga pendidikan untuk terlibat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, hanya saja masih terdapat sejumlah kendala seperti kualitas dan kuantitas SDM di lembaga pendidikan, keterbatasan fasilitas, keterbatasan anggaran, dan lain sebagainya. Hal ini mempengaruhi tingkat keaktifan lembaga pendidikan dalam memerangi bahaya penyalahgunaan narkoba. Adapun efektivitas pencegahan penyalahgunaan narkoba masih memerlukan peningkatan pada sejumlah aspek, terutama pada internal lembaga pendidikan seperti manajemen konseling, integrasi materi narkoba dengan kurikulum, manajemen evaluasi dan sistem pelaporan kegiatan, dan lain sebagainya.

3.2 Pengujian Hipotesis Penelitian

Penelitian ini menguji fakta empiris tentang pengaruh implementasi program advokasi pencegahan penyalahgunaan narkoba terhadap partisipasi lembaga pendidikan menengah dan tinggi dalam mewujudkan efektivitas pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Garut

Paradigma penelitian yang dianalisis disajikan pada gambar berikut:



Gambar 1. Paradigma Penelitian

Adapun hasil perhitungan statistika disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil analisa statistika

Hipotesis Utama	Koefisien Jalur	F _{hitung}	F _{tabel}	Determinan	Makna Hubungan
Pengaruh implementasi program advokasi pencegahan penyalahgunaan narkoba terhadap partisipasi lembaga pendidikan menengah dan tinggi dalam mewujudkan efektivitas pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Garut	0.8679	13.0734	2.004	0.7532.	Positif dan Signifikan
Sub Hipotesis	Koefisien Jalur	t _{hitung}	t _{tabel}	Determinan	Makna Hubungan
Pengaruh implementasi program advokasi pencegahan penyalahgunaan narkoba terhadap partisipasi lembaga pendidikan menengah dan tinggi	0.7999	10.0612	2.004	0.6398	Positif dan Signifikan
Partisipasi lembaga pendidikan menengah dan tinggi dalam mewujudkan efektivitas pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Garut	0.6567.	5.0840	2.004	0.5615	Positif dan Signifikan
Implementasi program advokasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dalam mewujudkan efektivitas pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Garut	0.2480	2.2218	2.004	0,0615	Positif dan Signifikan

3.2.1 Pengaruh Implementasi Program Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Partisipasi Lembaga Pendidikan Menengah dalam Mewujudkan Efektivitas pencegahan penyalahgunaan narkoba

Implementasi program advokasi pencegahan penyalahgunaan narkoba berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap partisipasi lembaga pendidikan menengah dalam mewujudkan efektivitas pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Garut sebesar 75.32%, sedangkan sisanya sebesar 24.68% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel.

Adanya pengaruh dari implementasi program advokasi pencegahan penyalahgunaan narkoba berpengaruh terhadap partisipasi lembaga pendidikan menengah dan tinggi dalam mewujudkan efektivitas pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Garut menunjukkan bahwa implementasi yang dilaksanakan melalui optimalisasi unsur komunikasi, penyediaan sumber daya, penguatan disposisi dan struktur birokrasi dapat mendorong proses partisipasi lembaga pendidikan. Dengan kata lain, lembaga pendidikan memiliki landasan kebijakan untuk berperan serta dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh siswa/ mahasiswa. Pada akhirnya hal ini dapat mendorong terwujudnya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan lembaga pendidikan. Oleh karena itu diperlukan penguatan pada aspek implementasi kebijakan agar peran serta lembaga pendidikan dapat terdorong sehingga pencegahan dapat dilakukan secara efektif.

3.2.2 Pengaruh Implementasi Program Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Partisipasi Lembaga Pendidikan Menengah

Implementasi program advokasi pencegahan penyalahgunaan narkoba berpengaruh secara positif terhadap partisipasi lembaga pendidikan menengah dan tinggi. Adapun besar pengaruh Implementasi program advokasi pencegahan penyalahgunaan narkoba terhadap partisipasi lembaga pendidikan menengah dan tinggi adalah sebesar 63.98% sedangkan sisanya sebesar 36.02% dipengaruhi oleh variabel lain

Temuan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi lembaga pendidikan dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dipengaruhi oleh pelaksanaan kebijakan mengenai pencegahan itu sendiri. Bahwa lembaga pendidikan dapat terdorong melakukan partisipasi dan komitmen apabila sebelumnya telah mengetahui kebijakan yang dikomunikasikan oleh pihak BNNK. Adanya proses implementasi kebijakan juga mendorong disposisi/ kecenderungan dari lembaga pendidikan dalam menyikapi program BNNK.

Hal ini didukung studi dokumentasi pada LKIP BNNK Garut tahun 2016, bahwa faktor pendukung dalam mencapai indikator kinerja indeks kemandirian partisipasi stakeholder adalah adanya komitmen stakeholder di daerah dalam upaya pencegahan dan penanganan narkoba. Kemudian pelayanan yang optimal dari petugas BNN dalam menindaklanjuti pendataan mandiri yang dilaksanakan stakeholder tersebut. Pengaruh kebijakan terhadap partisipasi juga didukung oleh studi dokumentasi pada LKIP BNNK Garut tahun 2016, bahwa salah satu faktor hambatan dalam mengukur kemandirian partisipasi stakeholder khususnya pemangku kepentingan terkait di tingkat daerah adalah masih belum terciptanya Peraturan Gubernur atau Peraturan Daerah yang mempertegas Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2013 tentang fasilitasi pencegahan bahaya narkoba. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan negara mempengaruhi proses partisipasi di lapangan.

3.2.3. Partisipasi Lembaga Pendidikan Menengah dalam Mewujudkan Efektivitas pencegahan penyalahgunaan narkoba

Partisipasi lembaga pendidikan menengah dan tinggi berpengaruh secara positif dalam mewujudkan efektivitas pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Garut sebesar 56.15% sedangkan sisanya sebesar 43.85% dipengaruhi oleh variabel lain.

Dalam masalah penanggulangan narkoba, sekolah memegang peranan penting karena sekolah merupakan tempat berkumpulnya anak-anak muda yang sering dijadikan sasaran. Program pendidikan yang efektif dan luas merupakan bagian yang penting dari tindakan penanggulangan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pencegahan melalui pendidikan sebagai sebuah proses berkesinambungan dengan tujuan menghindari narkoba. Kurikulum dan program yang dikembangkan lembaga pendidikan menjadi bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat.

3.3.4 Pengaruh Implementasi Program Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Efektivitas pencegahan penyalahgunaan narkoba

Implementasi program advokasi pencegahan penyalahgunaan narkoba memberikan pengaruh nyata dan positif terhadap dalam mewujudkan efektivitas pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Garut sebesar 6.15%.

Adanya pengaruh implementasi program advokasi terhadap efektivitas pencegahan penyalahgunaan narkoba mengindikasikan bahwa apabila program advokasi dapat dijalankan secara optimal kepada lembaga pendidikan, maka dapat menekan laju penyalahgunaan narkoba di lingkungan lembaga pendidikan dengan menasar pelajar dan mahasiswa yang merupakan kelompok rentan. Hal ini dikarenakan adanya proses komunikasi kebijakan, penguatan disposisi, pemenuhan sumber daya maupun keberadaan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan sehingga pencegahan dapat dilakukan secara sistematis, terorganisir, serta memiliki landasan kebijakan yang kuat.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori menurut Rosjidi (dalam Iskandar, 2013), bahwa efektivitas adalah hasil guna yang dapat dicapai dengan melakukan serangkaian kegiatan sesuai peraturan dan perencanaan yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat keterkaitan antara efektivitas dengan peraturan yang ditetapkan, bahwa suatu tujuan dikatakan efektif apabila sesuai dengan peraturan yang ada. Jika peraturan tersebut diimplementasikan dengan tepat serta seluruh unsur seperti komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi dioptimalkan, maka dapat mempengaruhi tingkat efektivitas pencapaian tujuan organisasi.

Akan tetapi dengan tingkat signifikansi yang relatif kecil menandakan bahwa terdapat faktor lain yang juga memiliki pengaruh terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba. Faktor tersebut cukup kompleks, antara lain bagaimana peran serta keluarga dan masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kebijakan dari pemerintah, peran ulama dalam menumbuhkan spiritualitas generasi muda, ketersediaan wadah untuk menyalurkan kegiatan generasi muda ke arah yang positif, muatan edukasi dari media massa, hingga penegakan hukum serta perbaikan struktur sosial ekonomi.

Saran untuk pengoptimalan implementasi kebijakan: 1) Sosialisasi oleh BNNK Garut diusahakan dapat menjangkau seluruh peserta didik di lembaga pendidikan, hal ini dapat diupayakan dengan melakukan sosialisasi secara bertahap di satu lembaga pendidikan yang sama, 2) BNNK Garut lebih memaksimalkan peran media cetak, media online/ media sosial dan media luar ruang sebagai sarana penyebaran informasi sehingga dapat menjangkau target yang lebih luas; 3) BNNK Garut meningkatkan jumlah pelatihan kader anti narkoba untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas di lingkungan lembaga pendidikan; 4) BNNK Garut mendorong pembentukan satgas anti narkoba di lingkungan lembaga pendidikan, 5) Mengajukan

fasilitasi kebijakan kepada pemerintah pusat sehingga BNNK Garut dapat memfasilitasi lembaga pendidikan dalam penyelenggaraan kegiatan

Pada variabel partisipasi lembaga pendidikan, 1) Diperlukan asistensi serta dukungan dari BNNK Garut untuk penyelenggaraan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan lembaga pendidikan, 2) Perlu diadakan upaya seperti pemberian apresiasi dan pembinaan yang berkelanjutan kepada lembaga pendidikan yang berkomitmen tinggi sebagai penggiat anti narkoba, 3) BNNK Garut mendorong Pemerintah Daerah/ Provinsi untuk mengeluarkan peraturan yang mempertegas Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2013 tentang fasilitasi pencegahan bahaya narkoba, 4) BNNK Garut aktif mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong partisipasi pelajar dan mahasiswa dalam memerangi narkoba

Pada efektivitas pencegahan: 1) BNNK Garut mendorong dilaksanakannya proses evaluasi serta pelaporan oleh lembaga pendidikan agar kegiatan pencegahan dapat terkelola secara sistematis, 2) BNNK Garut mendorong lembaga pendidikan menerapkan pencegahan berbasis sekolah (*School Based Prevention*) yang dapat berupa: Memasukkan materi anti narkoba ke dalam berbagai kegiatan sekolah/ kampus, Mengadakan sosialisasi tentang bahaya narkoba dengan mengundang orang tua siswa/ mahasiswa, dan lain sebagainya.

4 Kesimpulan

Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari implementasi program advokasi pencegahan penyalahgunaan narkoba terhadap partisipasi lembaga pendidikan menengah dan tinggi dalam mewujudkan efektivitas pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Garut.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, R. (2010). *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- BNN. (2010). *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan BNN
- BNN. (2010). *Mahasiswa dan Bahaya Narkotika*. Jakarta: Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan BNN
- BNN. (2010). *Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Lembaga/ Instansi*. Jakarta: Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan BNN
- BNN. (2011). *Buku Panduan Pencegahan Narkoba Sejak Dini*. Jakarta: Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan BNN
- BNN. (2011). *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Remaja*. Jakarta: Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan BNN
- BNNP Jawa Barat (2015). *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. Bandung: Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan BNN

- Bustomi, Y., Ramdhani, M. A., & Cahyana, R. (2012). Rancang Bangun Sistem Informasi Geografis Sebaran Tempat Riset Teknologi Informasi di Kota Garut. *Jurnal Algoritma*, 9(1), 1-7.
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia
- Iskandar, J. (2016). *Indeks dan Skala dalam Penelitian*. Bandung: Puspaga.
- Iskandar, J. (2016). *Kapita Selekta Administrasi Negara*. Bandung: Puspaga.
- Iskandar, J. (2016). *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Puspaga.
- Iskandar, J. (2016). *Perilaku Manusia dalam Kelompok dan Organisasi*. Bandung: Puspaga.
- Iskandar, J. (2016). *Teori Administrasi*. Bandung: Puspaga.
- Iskandar, J. (2016). *Teori dan Isu Pembangunan*. Bandung: Puspaga.
- Iskandar, J. (2016). *Teori Sosial*. Bandung: Puspaga.
- Pasolong H. (2012). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, H. (2014). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Purwanto, A. E. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1-12.
- Ramdhani, A., Ramdhani, M. A., & Amin, A. S. (2014). Writing a Literature Review Research Paper: A step-by-step approach. *International Journal of Basic and Applied Science*, 3(1), 47-56.
- Ramdhani, M. A. (2014). Lingkungan Pendidikan dalam Implementasi Pendidikan Karakter. *Jurnal Pendidikan Universitas Garut*, 8(1), 27-36.
- Ramdhani, M. A., & Ramdhani, A. (2014). Verification of Research Logical Framework Based on Literature Review. *International Journal of Basic and Applied Science*, 3(2), 11-19.
- Ramdhani, M. A., & Suryadi, K. (2005). Consensus Method Development on Analytic Hierarchy Process. *International Conference on Quantitative Sciences and Its Applications* (pp. 1-10). Penang: Universiti Utara Malaysia.
- Slamet, C., Rahman, A., Ramdhani, M. A., & Darmalaksana, W. (2016). Clustering the Verses of the Holy Qur'an using K-Means Algorithm. *Asian Journal of Information Technology*, 15(24), 5159-5162.
- Sopiah, P. (2011). *Katakan Tidak Pada Narkoba*. Bandung: Dea Art Pustaka.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suntoro, I. (2015). *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Thoha, M. (2008). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Bandung: Kencana.
- Tsabit, A., Ramdhani, M. A., & Cahyana, R. (2012). Pengembangan Ganesha Digital Library untuk Membuat Situs Jurnal. *Jurnal Algoritma*, 9, 1-10.
- Wahab, S. A. (2015). *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno. (2012). *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CAPS.